

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., 2005, *Attitudes, Personality and Behavior*. Second Edition. New York.
- Anggraeni, M., D., 2011. “Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Anggraeni, M., D., dan Kiswara, E., 2011, “Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal*, hlm 1-30.
- Angkoso, B., 2010, “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak tentang Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris: Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jakarta Selatan)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anonim, 2015, 3. Apakah yang membedakannya dengan Sunset Policy tahun 2008?, <http://www.pajak.go.id/content/faq/14274/3-apakah-yang-membedakannya-dengan-sunset-policy-tahun-2008>. Diakses tanggal 19 Juni 2016 pk 21.00 WIB.
- Anonim, 2015, Ini Bedanya Sunset Policy 2008 vs TPWP 2015, <http://www.pajak.go.id>. Diakses pada 29 April 2016 pk 20.15.
- Anonim, 2015, Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Agustus 2015, <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015>. Diakses tanggal 14 Juni 2016 pk 02.56 WIB.
- Anonim, 2016, “Belum Sepekan Tax Amnesty Berlaku, Sudah Rp 5,2 Triliun Dana Masuk”, <http://batampos.co.id/2016/07/21/belum-sepekan-tax-amnesty-berlaku-sudah-rp-52-triliun-dana-masuk/>. Diakses tanggal 29 Juli 2016 pukul 11.11 WIB.
- Ardani, M., N., 2010, “Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)”, *Tesis*. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Arifin, Z., 2016, “Pengaruh *Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang.

- Ayudea, F., 2014, Terendah, Tingkat Kepatuhan Bayar Pajak di Surakarta, <http://berita.suaramerdeka.com/terendah-tingkat-kepatuhan-bayar-pajak-di-surakarta/>. Diakses tanggal 14 Maret 2017 pk 08.00 WIB.
- Bose, P., and Jetter, 2010, “A Tax Amnesty in the Context of a Developing Economy”, *Journal*.
- Chandra, A., A., 2016, Hari Kedua *Tax Amnesty* , KPP Menteng Dua Mulai Ramai, <http://finance.detik.com/read/2016/07/19/105056/3256283/4/hari-kedua-tax-amnesty-kpp-menteng-dua-mulai-ramai>. Diakses tanggal 29 Juli 2016 pukul 11.11 WIB.
- Dewantari, D., P., A., D., Sulindawati, G., E., dan Atmadja, A., T., 2017, “Implikasi Dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja”, *Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol.7 No.1, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ernawati, W., D., 2009, “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, Dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal*, hlm 1-21.
- Fahluzy, Septiani Fahmi dan Agustina, Linda, 2014, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal”, *Accounting Analysis Journal*, Vol.3, No.3, hlm 399-406.
- Hasyim, 2016, Membangun Kesadaran di Musim Setor Pajak, <http://www.tribunnews.com>. Diakses tanggal 14 Juni 2016 pk 21.54 WIB.
- Jotopurnomo C., dan Mangoting Y., 2013, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi di Surabaya”, *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, hlm 49-54.
- Kundalini, P., 2016, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kusuma, B., S., 2016, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sleman)”, *Sripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Lumbantoruan P., 2013, “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada WPOP Di KPP Pratama Bandung Cibeunying)”, *Jurnal*, hlm 1-16.
- Marchese C., 2014, “Tax Amnesty”, *Iel Paper In Comparative Analysis Of Institutions, Economics And Law* No.17, hlm 1-16.
- Mardiasmo, 2011, “*Perpajakan*” Edisi Revisi, Edisi 17, Andi, Yogyakarta
- Medistiara, Y., 2016, Jurus Pemerintah Kejar Setoran Pajak, dari *Sunset Policy Hingga Tax Amnesty*, <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3321398/jurus-pemerintah-kejar-setoran-pajak-dari-sunset-policy-hingga-tax-amnesty#top>. Diakses tanggal 18 Agustus 2017 pk 00.00 WIB.
- Nawangasasi, R., 2010, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Publik, Iklan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nar M., 2015, “The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty”, *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol.5, Issue 2 2015, hlm 580-589.
- Nazaruddin I., dan Basuki, A.T, 2016, *Analisis Statistik Dengan SPSS*, Edisi 1, Cetakan Kedua, Sleman, Danisa Media.
- Ngadiman dan Huslin D., 2015, “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”, *Jurnal Akuntansi*, Vol.14, No.2, hlm 225-241.
- Nova, D., 2015, “Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Pembayaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nurmantu, S., 2003, *Pengantar Perpajakan*, Cetakan Kedua, Granit, Jakarta.
- Nzioki, P., M., and Peter, O., R., 2014, “Analysis of Factors Affecting Tax Compliance in Real EstateSector: A Case of Real Estate Owners in Nakuru Town, Kenya”, *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol.5, No.1, hlm 1-11.

- Palil, M., R., Akir, M., R., Md, and Fadillah W., 2013, “The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity”, *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, Vol. I (1), hlm 118-129.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 Pasal 11.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 Pasal 12.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 Pasal 13.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 Pasal 14.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 Pasal 15.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008 Pasal 5 Ayat 1(a).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 Pasal 2.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 Pasal 3.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 Pasal 4 Permohonan TPWP 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK,03/2016 Pasal 23 ayat (1) tentang Fasilitas Pengampunan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 Pasal 31 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK,03/2016 Pasal 41 tentang Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK,03/2016 Pasal 42 tentang Kekurangan Pembayaran Uang Tebusan.
- Permatasari, A., dan S. P., D'yan, Y., 2012, “Pengaruh Kesadaran WP dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WP Dalam Membayar PBB”, *Jurnal*, hlm 1-15.
- Putri, K., J., dan Setiawan, P., E., 2017, “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal*, Vol. 18, hlm 1112-1140.
- Rahardjo, B., dan Edhy, D. S. S., 2002, *Dasar-Dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan*, Cetakan Pertama, CV Eko Jaya, Jakarta.

- Rahmanto, B., R., 2015, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahmawaty, Ningsih, E., S., dan Fadhli, W., 2011, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh)", *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol.4, No.2, hlm 202 – 215.
- Ratnawati, J., dan Hernawati, R., I., 2015, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- Redae, B. R., and Sekhon, S., 2015, "Taxpayers Knowledge and Tax Compliance Behavior in Ethiopia: A Study of Tigray State", *International Journal of Management and Commerce Innovations*", Vol.3, Issue 2, hlm 1090-1102.
- Resmi, S., 2003, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Sadewa, G., N., 2016, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Yogyakarta)", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Santioso, L., dan Kusnawati, 2013, "Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Tahun 2011", *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol.6, No.12, hlm 151-163.
- Sekaran, U., dan Bougie, R., 2010, *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*, Edisi 5, John Wiley & Sons, United Kingdom.
- Silitonga, E., 2012, Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum, <http://www.pajak.go.id>. Diakses tanggal 29 April 2016 pk 19.05.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Ke-18, Alfabeta, Bandung.
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro, 2010, *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*, Edisi 1, CV. Andi, Yogyakarta.
- Suryanto, F., 2009, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu)", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Susanto, H., 2012, Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak, <http://www.pajak.go.id>. Diakses tanggal 29 April 2016 pk 19.00 WIB.
- Sutanto, A., H., 2012, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Sunset Policy Pada Kpp Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II”, *Jurnal*.
- Tahar, A., dan Rachman, A., K., 2014, “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal*, Vol.15, No.1.
- Tahar, A., dan Sandy, W., 2012, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Kpp, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.12, No.2, hlm: 185-196.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Pasal 2 tentang Asas Dan Tujuan Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Subjek dan Objek Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 4 tentang Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 6 tentang Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 7 tentang Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 8 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 9 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 10 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 11 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan.

Utami, C., D., dan Devano, S., 2016 “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 terhadap Niat Kepatuhan Perpajakan (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah DJP Jabar I), *Jurnal*.

Utami, T., D., dan Kardinal. 2013, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu”, *Jurnal*, hlm 1-9.

Utami, S., R., Andi, dan Soerono, A., N., 2012, “Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang”. *Jurnal*, hlm 1-28.

Wardah, Z., 2016, “Pengaruh Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Jilid II terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak DIY”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yustiari, S., H., 2016, “*Tax Amnesty* dalam Perspektif *Good Governance*”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol.2, No.4, hlm 166-170.